

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Menurut Soemitro (Resmi, 2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di sisi lain bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan.

Penghasilan karyawan dalam sebuah perusahaan akan dilakukan pemotongan atas pajak oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja dan pada akhirnya perusahaan akan menyetorkannya kepada pemerintah. Menurut Gunadi (2013:241), pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Penghasilan dari karyawan tersebut dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan. Perhitungan pajak penghasilan merupakan perhitungan atas penghasilan yang dimana formula perhitungannya telah diatur di dalam peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Setelah perhitungan pajak penghasilan dilakukan, maka perusahaan melakukan pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan. Penyetoran pajak dilakukan di bank atau kantor pos, yang dimana akan diberikan bukti tanda pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21.

Setelah penyetoran pajak dilakukan, maka perusahaan melaporkan pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Wajib pajak dalam hal ini dituntut untuk tepat waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Resmi (2014:44) menyatakan bahwa batas waktu penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 10 hari setelah berakhirnya masa pajak. Sedangkan, batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 adalah 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Kemudian, batas penyetoran SPT PPh badan adalah tanggal 25 bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak. Sedangkan, batas pelaporan SPT PPh badan adalah paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun pajak.

Besarnya beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meringankan beban tersebut adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Menurut Harnanto (2013:3), perencanaan pajak adalah suatu proses pengintegrasian usaha-usaha Wajib Pajak atau sekelompok Wajib Pajak untuk meminimalisasikan beban atau kewajiban pajaknya baik yang berupa Pajak Penghasilan maupun pajak-pajak yang lain melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan, penghematan pajak (*tax saving*), dan penghindaran pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Tujuan dari melakukan perencanaan pajak adalah meminimalisasi beban pajak yang terutang dan memaksimalkan laba setelah pajak. Dengan demikian, perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak yang

minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak yang dapat diterima oleh fiskus dan sama sekali bukan karena penyelundupan pajak.

Menurut Pohan (2013:107), terdapat tiga macam metode perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan antara lain *net method*, *gross method*, dan *gross up method*. Alternatif yang pertama adalah *net method* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung PPh Pasal 21 terutang karyawan. Alternatif yang kedua adalah *gross method* yaitu metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan terutangnya. Alternatif yang ketiga disebut dengan *gross up method* yaitu metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 yang di formulasikan jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 yang akan dipotong dari karyawan. Dari ketiga metode tersebut, salah satu yang dapat diterapkan untuk melakukan perencanaan pajak adalah *gross up method*. Dalam metode *gross up*, tunjangan pajak yang diberikan bersifat *taxable*, sehingga menambah besarnya penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Sementara bagi pemberi kerja (perusahaan), tunjangan pajak yang diberikan bersifat *deductible expense*, sehingga menyebabkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan demikian, pajak yang harus ditanggung atau dibayar oleh perusahaan juga lebih rendah (penghematan pembayaran pajak). Dalam hal ini, tunjangan pajak yang diberikan tersebut merupakan beda tetap/permanen.

Standar akuntansi keuangan (SAK) memiliki perbedaan dengan peraturan perpajakan terkait mengenai pajak penghasilan. Perbedaan antara standar akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan dikelompokkan menjadi dua yaitu perbedaan tetap/permanen dan perbedaan waktu/temporer. Menurut Suandy (2014b:97), beda tetap/permanen adalah perbedaan yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan. Sedangkan, beda waktu/temporer adalah perbedaan yang disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu berdasarkan standar akuntansi dengan peraturan perpajakan (Suandy, 2014b:97). Untuk menjembatani perbedaan tersebut, maka IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) menerbitkan aturan yaitu PSAK 46 tentang pajak penghasilan. Dengan aturan tersebut, perusahaan tidak hanya mempertanggungjawabkan konsekuensi pajaknya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang yaitu dengan mengakui adanya aktiva/kewajiban pajak tangguhan. Dalam hal ini, perusahaan diharuskan untuk menerapkan PSAK 46, agar laporan keuangan yang dihasilkan telah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

Penelitian ini dilakukan di perusahaan pengemasan yang berlokasi di Gresik. Dimana perusahaan ini adalah perusahaan manufaktur di bidang industri pengemasan (*packaging*) yang memproduksi berbagai macam kemasan dan kotak box dari kertas dan karton. Perusahaan ini memiliki karyawan dengan total kurang lebih sebesar 380 orang.

Besarnya jumlah karyawan yang dimiliki dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, tentunya membuat sistem perhitungan pajak penghasilan merupakan faktor penting bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan belum menerapkan metode *gross up* kaitannya dengan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan. Selain itu, perusahaan juga belum menerapkan aturan PSAK 46 mengenai pajak penghasilan, sehingga konsekuensi pajak di masa mendatang belum diperhitungkan. Oleh karena itu, apabila perusahaan menerapkan metode *gross up* dan PSAK 46, maka dapat meringankan beban pajak penghasilan (PPh Badan) terhutangnya serta laporan keuangan yang dihasilkan juga menjadi lebih wajar. Mengingat pentingnya akan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah topik dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan PPh Badan dan PSAK 46 (Studi Kasus pada Perusahaan Pengemasan di Gresik)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan perencanaan pajak dengan menggunakan metode *gross up* untuk pajak penghasilan pasal 21 sebagai strategi penghematan pembayaran pajak pada perusahaan tersebut?

- b. Bagaimana penerapan PSAK 46 pada perusahaan tersebut sebagai strategi penghematan pembayaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui seberapa besar penghematan pembayaran pajak yang dapat diperoleh perusahaan atas penerapan perencanaan pajak melalui penggunaan metode *gross up* untuk pajak penghasilan pasal 21 dan PSAK 46 serta agar laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih wajar.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang perpajakan, terutama dalam hal penerapan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 melalui penggunaan metode *gross up* dan PSAK 46 kaitannya dengan strategi penghematan pembayaran pajak dan kewajaran laporan keuangan.

- b. Manfaat Praktik

Bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian bahwa dengan melakukan perencanaan pajak melalui penggunaan metode *gross up* untuk pajak penghasilan pasal 21, maka dapat meringankan beban pajak yang harus dibayar atau ditanggung oleh perusahaan. Serta, bagi karyawan yang

bekerja di perusahaan tersebut, dengan adanya penerapan perencanaan pajak melalui penggunaan metode *gross up*, maka dapat meningkatkan kesejahteraan para karyawan tersebut. Selain itu dengan adanya penerapan PSAK 46, maka laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan menjadi lebih wajar karena telah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, dan rerangka berpikir.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan desain penelitian, subjek, objek, dan periode penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran bagi perusahaan yang menjadi objek penelitian.